

**MOTIVASI PBB MEMBENTUK *UNITED NATION MISSION IN DARFUR*
(UNAMID) SEBAGAI *PEACEKEEPING OPERATION* PBB PADA
KONFLIK SUDAN 2007**

**Oleh: Deldiya
(deldiya22@gmail.com)**

**Pembimbing: Yuli Fachri, S.H., M.Si
Jurusan Ilmu Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau**

Kampus Bina Widya Jl. HR. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28294
Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

This research aims to analyze how UNAMID peacekeepers have resolved armed conflict in the Darfur region of Sudan since 2003. The Darfur conflict involves the Sudanese government assisted by the Janjaweed militia with Sudan Liberation Movement (SLM) and Justice Equality Movement (JEM) groups. The Darfur conflict is of international concern due to attacks by Janjaweed militias against Darfur civilians. Resulted the UN and the African Union decided to intervene in resolving the conflict that occurred in Darfur, Sudan.

The data used in this study a secondary data. Secondary data was obtained through library research, and search online media research. The writer uses of the pluralism perspective and organization level of analysis. Theories used in this study is based on the organization theory by Clive Archer.

The research result is indicate that in resolving the Darfur conflict, UN forming a peace operation to wit UNMIS and UNAMID. The African Union participated in resolving the Darfur conflict also forming a peace operation that is AMIS. As a result of the inadequate role of AMIS and UNMIS due to difficulties with logistics, funding and lack of experience in the field of peacekeeping operations, the AMIS mandate was replaced by UNAMID. UNAMID's various program efforts in Darfur to protect civilians from attacks by Janjaweed militia. Although UNAMID often encounters obstacles that hinder the realization of a peace mission in Darfur.

Keywords: AMIS, UNMIS, UNAMID, Peacekeeping Operation, UNSC, African Union, Janjaweed Militia, SLM, JEM, Sudan Government.

I. Pendahuluan

Afrika merupakan kawasan yang sangat rawan terjadinya konflik, baik konflik antar etnis maupun konflik bersenjata. Afrika terkenal dengan kekayaan yang berlimpah namun tetap mengalami konflik berkepanjangan.

Sudan yang merupakan salah satu Negara di Afrika yang menyita perhatian dunia internasional. Sudan yang mengalami konflik antar etnis yang berlangsung selama 17 tahun disebabkan oleh marginalisasi yang dilakukan oleh pemerintah Sudan terhadap warga Darfur dan perebutan sumber daya alam.

Darfur adalah daerah yang terletak dibagian barat Sudan dihuni oleh lebih dari 30 etnis dengan jumlah penduduk mencapai 6 juta jiwa. Suku Fur merupakan penduduk local yang telah lama menetap di Darfur. Sedangkan suku arab merupakan suku pendatang yang menempati wilayah Darfur bagian utara dan selatan.

Konflik yang berawal dari perebutan sumber daya alam dan pembagian kekuasaan pemerintah. Terjadinya marginalisasi politik dan ekonomi antara pemerintah pusat dengan daerah mendorong munculnya kelompok pemberontak *Darfur Liberation Front* (DLF). Kelompok DLF melakukan penyerangan terhadap markas pemerintah di kota Golo, Jebel Marra. Penyerangan tersebut menuntut agar mendapatkan keadilan terutama mencakup masalah ekonomi dan partisipasi politik yang lebih luas. Kelompok DLF kemudian mengganti nama menjadi *Sudan Liberation Movement* (SLM).

Dalam menghadapi kelompok pemberontak, pemerintah Sudan dibantu oleh milisi *Janjaweed*, yang merupakan suku arab. Milisi *Janjaweed* mendapat bantuan dana, logistic serta senjata dari pemerintah Sudan dalam melancarkan serangannya. Akibat serangan yang dilakukan oleh milisi *Janjaweed* tersebut, lebih dari 2 juta penduduk Darfur kehilangan tempat tinggal dan harus mengungsi ke Negara Chad.

Konflik Darfur yang semakin memakan korban, membuat Uni Afrika mengambil alih untuk menyelesaikan konflik tersebut. Pada 2004, Uni Afrika membentuk pasukan perdamaian yang diberi nama *African Union Mission In Sudan* (AMIS). Dibentuk dengan tujuan untuk melakukan operasi perdamaian dan memonitor krisis Darfur setelah ditandatangani gencatan senjata pada 8 April 2004.

Belum stabilnya konflik Darfur membuat misi AMIS di perpanjang. Namun karena kemampuan AMIS tidak optimal serta banyaknya terjadi penyerangan terhadap tentara AMIS oleh kelompok pemberontak dan kurangnya pendanaan mengakibatkan AMIS berada di ambang kehancuran.

Pada 24 Maret 2005, DK PBB membentuk pasukan perdamaian yaitu *United Nation Mission In Sudan* (UNMIS) untuk membantu AMIS dalam menyelesaikan konflik Darfur. UNMIS diberi mandate untuk mendukung pelaksanaan kesepakatan *Comprehensive Peace Agreement* (CPA), memfasilitasi dan mengkoordinasi bantuan kemanusiaan di Darfur Sudan.

Melihat situasi krisis Darfur yang terus meningkat, DK PBB memerintahkan pemerintah Sudan untuk melucuti senjata milisi *Janjaweed* berdasarkan resolusi no.1556.

UNMIS terus melakukan penyebaran pasukan untuk membantu pelaksanaan CPA dan menyelesaikan konflik Darfur yang berujung pada krisis kemanusiaan. DK PBB memutuskan UNMIS akan dikuatkan oleh personil militer hingga 17.300 yang terdiri dari polisi sipil dan tim pengamat.

Namun akibat keterbatasan ruang gerak dan adanya penyerangan terhadap pasukan UNMIS oleh kelompok pemberontak dan milisi *Janjaweed*, membuat UNMIS tidak optimal dalam menjalankan mandatnya di Darfur. Sehingga PBB bersama Uni Afrika menggabungkan kekuatan dengan menggunakan *peacekeeping operation* untuk menyelesaikan konflik Darfur.

Pada 31 Juli 2007, berdasarkan resolusi no.1769 (2007) dibentuklah pasukan penjaga perdamaian yaitu *United Nation Mission In Darfur* (UNAMID). UNAMID adalah misi gabungan PBB dengan Uni Afrika untuk menyelesaikan krisis kemanusiaan yang terjadi di Darfur.

UNAMID bertindak berdasarkan Chapter VII piagam PBB dengan masa aktif selama 12 bulan dan mengambil alih tugas AMIS dan UNMIS sebelumnya.

Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan perspektif pluralism dalam menganalisis peran UNAMID sebagai *peacekeeping operation* pada konflik

Darfur. Kaum pluralism mengatakan bahwa hubungan internasional tidak hanya antar Negara, tetapi juga antar kelompok dan organisasi lintas batas internasional.

Penulis menggunakan kelompok sebagai tingkat analisa penelitian ini. Tingkat analisa tergantung kepada masalah atau gejala yang akan diteliti. Tingkat analisa akan memberikan kemungkinan untuk terjawabnya pertanyaan dari mana sebuah penelitian itu akan dimulai dan actor mana yang akan menjadi perhatian.¹

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori organisasi internasional. Pada penelitian ini akan digambarkan peranan PBB membentuk UNAMID sebagai organisasi internasional dalam menangani masalah yang berkaitan dengan ungsi dan tugasnya.

Metode Penelitian

Metode yang diterapkan adalah metode kualitatif yang bersifat deskriptif memaparkan gambaran tentang situasi fenomena sosial, rangkaian proses menjangkau informasi dalam objek yang akan dihubungkan dengan suatu masalah baik dari sudut pandang teoritis maupun praktis. kemudian dilanjutkan dengan interpretasi data agar dapat menjelaskan atau menganalisa masalah serta memberikan jawaban terhadap bagaimana UNAMID dalam menjalankan misinya selama di konflik Darfur.

Teknik yang digunakan adalah dengan menghubungkan teori dan data dengan pengumpulan data sekunder yang berbasis pustaka yang dikenal dengan

¹ Rizky Octa Putri Charin dan M. Saeri. 2016. *Kepentingan Iran Melakukan Intervensi terhadap Konflik Internal Yaman*. Pekanbaru. Hal.1933

istilah penelitian perpustakaan (*library research*). Penelitian ini dilakukan dengan cara menggabungkan berbagai sumber dari penelitian-penelitian ilmiah berupa buku-buku, jurnal, tulisan-tulisan ilmiah diterbitkan di website dan sumber internet lainnya yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

Ruang lingkup penelitian yang ingin penulis paparkan adalah mengenai mengapa dan apa saja program yang akan dibuat oleh UNAMID sebagai *peacekeeping operation* PBB pada konflik Darfur tahun 2007.

II. Pembahasan

Sejarah Konflik Darfur

Pasca perang dunia II, Inggris memberikan kemerdekaan kepada Sudan pada 1 Januari 1956. Sejak merdeka, konflik Darfur menjadi berlarut-larut ketika pemerintah Sudan membagi wilayah-wilayah yang kaya akan sumber daya alam untuk ditempati oleh etnis Arab. Akibatnya, masyarakat Sudan terpecah menjadi dua kelompok yakni kelompok yang tergabung dalam pemberontakan melawan pemerintah dan kelompok yang berpihak pada pemerintah.

Pemberontakan yang terjadi terhadap pemerintah semakin kuat di Darfur. Untuk melawan kelompok pemberontak tersebut, pemerintah Sudan membentuk milisi sipil yang berasal dari keturunan Arab yang disebut milisi *Janjaweed*.

Dibawah pemerintahan Al-Bashir, milisi *Janjaweed* dilatih dan disenjatai untuk memerangi etnis Afrika yang ada di Darfur. Akibatnya kelompok pemberontak SLM dan JEM melakukan serangan

kembali. Melihat konflik yang terus terjadi, pemerintah Sudan memberikan wewenang kepada milisi *Janjaweed* untuk melakukan apapun untuk menyelamatkan Darfur. Penyerangan-penyerangan yang dilakukan oleh milisi *Janjaweed* sering mendapat bantuan langsung dari pemerintah Sudan.

Hingga Januari 2004, mayoritas korban tewas adalah etnis Afrika Darfur yang mencapai 10.000 jiwa.² Akibatnya 200.000 warga sipil mengungsi ke Negara tetangga seperti Chad. Meskipun telah melakukan pengungsian, kamp-kamp yang berada di perbatasan Darfur kerap diserang oleh milisi *Janjaweed*.

Berdasarkan laporan *Human Rights Watch*, bahwa angka kematian etnis Afrika yang mencapai puluhan ribu orang dalam satu tahun telah mengindikasikan adanya praktik genosida. Sehingga mengundang kecaman dari dunia internasional.

PBB menyebut Darfur dalam keadaan darurat, dimana banyaknya terjadi pelanggaran HAM. Pada 2004, dilakukanlah negosiasi antara milisi *Janjaweed* dan kelompok SLM dan JEM yang menghasilkan kesepakatan untuk melakukan gencatan senjata, stabilitas keamanan dan permasalahan kemanusiaan untuk menyelesaikan konflik Darfur.³

Pelucutan senjata kelompok pemberontak merupakan hal yang harus segera dipenuhi dan dijalankan oleh pemerintah Sudan untuk melindungi warga

² Korban Tewas Konflik Darfur. <http://www.dw.com/id/korban-tewas-konflik-darfur-bisa-mencapai-300000-orang/a-3287551> diakses pada 23 April 2017

³ Abdul Hadi Adnan. (2008). *Perkembangan Hubungan Internasional di Afrika*. Hal.118

sipil dari serangan- serangan pihak yang berkonflik. Meskipun telah banyak perjanjian yang telah ditandatangani, namun selalu dilanggar oleh milisi *Janjaweed* dan kelompok pemberontak.

Semakin meluasna konflik Darfur membuat PBB melakukan intervensi. Pada awalnya, Uni Afrika telah melakukan intervensi dengan mengirimkan pasukan perdamaian AMIS ke wilayah konflik. Namun melihat situasi konflik Darfur yang tak kunjung meredam, DK PBB kemudian membentuk UNMIS. Meskipun AMIS telah dibantu oleh UNMIS konflik Darfur tetap berkejolak. Sehingga pada 31 Juli 2007, DK PBB dengan Uni Afrika sepakat untuk menggabungkan kekuatan mereka dengan membentuk UNAMID.

UNAMID yang diberi mandate untuk memberikan perlindungan kepada warga sipil serta membantu penyebaran bantuan HAM di Darfur. Dalam menjalankan misinya, UNAMID dibantu oleh 97.000 pasukan militer yang berasal dari 110 negara.⁴

Aktor yang terlibat

Mengamati kelompok- kelompok pemberontak yang terus melakukan penyerangan terhadap warga sipil, sekjen PBB menyampaikan bahwa pemerintah Sudan sebaiknya menerima batuan dari pihak luar maupun dalam untuk menghentikan serangan yang terjadi dan melindungi rakyat sudan.

Pertama, Uni Afrika. Dibentuknya Uni Afrika dengan tujuan untuk menjaga

perdamaian di tiap- tiap Negara anggota Afrika. Keterlibatan Uni Afrika untuk meredam konflik Darfur untuk mengupayakan perdamaian antara pemerintah Sudan dan kelompok pemberontak SLM. Maka dilakukanlah mediasi untuk mencapai perdamaian tersebut. Dari mediasi tersebut ditandatanganinya sebuah perjanjian pada 5 Mei 2006. Perjanjian tersebut dikenal dengan *Darfur Peace Agreement (DPA)*, yang berisikan tentang:⁵

1. Pembagian kekuasaan. Dalam sebuah Negara demokrasi pembagian kekuasaan merupakan hal yang sangat penting.
2. Pembagian kesejahteraan ekonomi. Sumber daya alam yang ada di setiap wilayah harus dilakukan pemerataan demi kesejahteraan warga sipil di sudan. Bahwa setiap warga Negara memiliki hak- hak dasar yang sama.
3. Ketentuan gencatan senjata dan stabilitas keamanan. Menekankan kepada milisi *Janjaweed* dan kelompok pemberontak SLM, supaya mentaati perjanjian- perjanjian yang telah di sepakati sebelumnya agar tercapainya perdamaian di Darfur.

Dalam *Darfur Peace Agreement* telah dirancang berbagai proses yang harus dilalui Sudan agar Darfur tetap kondusif dalam mewujudkan perdamaian. Pasca disetujuinya DPA, serangan dan bentrokan antara milisi *Janjaweed* dan kelompok SLM dan JEM masih terus terjadi di Darfur.

⁴ Petrus Krisologus Jullio Sambi. (2016). *Peranan UNAMID Dalam Mengatasi Konflik Bersenjata Antara Kelompok Pemberontak di Darfur Dengan Pemerintah Sudan.*

⁵ <http://www.un.org/zh/focus/southernsudan/pdf/dpa.pdf> diakses pada 29 April 2017

Kedua, Dewan Keamanan PBB. PBB memiliki sebuah yang disebut dengan *Department of Peacekeeping Operation (DPKO)* yang bertujuan untuk mempertahankan kondisi gencatan senjata, menjaga stabilitas dan usaha-usaha untuk mewujudkan perdamaian.

Sejak AMIS tidak dapat menjalankan mandate dari Uni Afrika karna beberapa kendala, PBB akhirnya memutuskan untuk membantu AMIS dengan membentuk pasukan perdamaian UNMIS pada tahun 2005. Pasukan perdamaian UNMIS diberi mandate oleh DK PBB dengan tujuan menerapkan dan mendukung pelaksanaan *Comprehensive Peace Agreement (CPA)*. CPA merupakan perjanjian yang ditandatangani oleh pemerintah Sudan dan kelompok SLM pada 9 Januari 2005. Kesepakatan ini memuat tentang kesepakatan politik, ekonomi, budaya dan HAM.

Namun PBB melihat AMIS dan UNMIS tidak mampu untuk menekan konflik yang terus terjadi di Darfur. Proses perdamaian yang berjalan lambat disebabkan oleh keterbatasan ruang gerak yang dilakukan oleh pemerintah Sudan. Sehingga, pada 31 Juli 2007, dibentuklah *United Nation Mission In Darfur* melalui resolusi no.1769 dengan masa aktif 12 bulan.⁶

Ketiga, Uni Eropa. Pada 26 Juni 2004, Uni Eropa menyambut baik mengenai Deklarasi Nairobi yang merupakan fase menuju perdamaian di Darfur. Keterlibatan Uni Eropa dalam konflik Darfur dibuktikan dengan dikeluarkannya tiga

resolusi yakni pada tanggal 6 April, 16 September dan 28 September 2006.⁷

Melihat situasi Darfur yang semakin memanas, Uni Eropa meminta dengan keras kepada pemerintah Sudan untuk menghentikan dan mengakhiri perbuatan milisi *Janjaweed*.

Uni Eropa juga menyarankan agar Uni Afrika segera menyelesaikan rencana-rencana terkait penyebaran pasukan perdamaian serta penambahan kekuatan. Uni Eropa juga memberikan bantuan kemanusiaan kepada warga sipil.

Berdasarkan laporan *Directorat General for Humanitarian Aid* Uni Eropa pada tahun 2006, bahwa Uni Eropa juga memberikan bantuan dana kemanusiaan yang dibagi dalam 7 sektor yaitu:⁸

1. *Health and Nutrition*
2. *Food Aid*
3. *Water and Sanitation*
4. *Shelter/ nonfood items*
5. *Food/ livelihood security*
6. *Protection*
7. *Operation*

Penyebaran bantuan-bantuan tersebut dibantu oleh lembaga atau organisasi regional dan internasional yang terlibat dalam misi kemanusiaan di Darfur. Keterlibatan Uni Eropa ini sangat didukung oleh Uni Afrika dan PBB.

Pelanggaran HAM di Darfur

Meningkatnya ancaman terhadap pelanggaran HAM di wilayah konflik Darfur terus meluas seiring meningkatnya konflik akibat serangan yang dilakukan

⁶ UNAMID Mandate. <http://unamid.unmissions.org/unamid-mandate> diakses pada 19 Maret 2017

⁷ <http://www.ec.europa.eu.echo/darfurfinal.pdf>

⁸ *Ibid*

oleh milisi *Janjaweed* dan kelompok pemberontak SLM.

1. Kejahatan Genosida.

Konflik antara milisi *Janjaweed* dan kelompok SLM serta JEM mengancam keamanan warga sipil Darfur. Milisi *Janjaweed* telah melakukan pemantauan terhadap warga Darfur. pemerintah Sudan merupakan pemasok senjata bagi milisi *Janjaweed* dalam melakukan penyerangan di Darfur. Hal ini membuat dunia internasional khawatir akan terjadi genosida.

Pemerintah Sudan yang mendukung pembantaian terhadap etnis yang berada di Darfur. pemerintah Sudan yang juga mempersenjatai dan memberikan perlindungan politik kepada milisi *Janjaweed* dalam memerangi etnis Darfur.

Berdasarkan laporan *Human Right Watch*, bahwa ribuan suku Fur, Masaalit dan Zaghawa yang merupakan pemeluk agama islam dan sekaligus suku asli Afrika telah tewas di Darfur akibat penyerangan yang dilakukan oleh milisi *Janjaweed*.

Pada juli 2007, *UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs* (OCHA) melaporkan bahwa 160.000 warga sipil Darfur telah mengungsi ke Negara tetangga. Akibat banyaknya warga sipil yang mengungsi, kamp- kamp yang ada tidak mampu lagi untuk menampung para pengungsi yang semakin banyak.

Melihat kondisi Darfur, ICC mulai melakukan investigasi terkait kejahatan kemanusiaan yang terjadi di Darfur. ICC memiliki mandate untuk menginvestigasi

para penjahat perang dan pelaku genosida berdasarkan statuta roma.⁹

2. Pemerksaan

Kekerasan terhadap perempuan merupakan fenomena yang tidak dapat dipisahkan dari konflik atau pun peperangan. Kaum perempuan adalah yang sering mengalami pelanggaran terhadap hak- haknya dalam sebuah konflik. Banyak jenis kekerasan yang terjadi baik itu pemerksaan, pelecehan seksual dan lainnya. Penggunaan kekerasan terhadap perempuan sering kali dijadikan sebagai strategi dalam perang.

Kekerasan seksual yang kerap terjadi pada wanita dan anak anak perempuan karena mereka dituduh mendukung kelompok pemberontak SLM. Mereka sering mendapatkan serangan dari milisi *Janjaweed* baik itu ketika berada di kamp maupun diluar.

ICG yang bermarkas di Brussel, melaporkan bahwa sebanyak 250.000 perempuan diperksa secara massal oleh milisi *Janjaweed*.¹⁰ Semakin buruknya situasi di Darfur terlihat dari peningkatan permusuhan antara pemerintah Sudan dengan kelompok- kelompok pemberontak. Mengakibatkan meningkatnya jumlah kekerasan yang terjadi dan jumlah penungsi yang terus meningkat. PBB melaporkan bahwa 300 ribu orang tela tewas akibat konflik Darfur, 4.4 juta membutuhkan bantuan dan 2,5 juta mengungsi dri Darfur.

⁹ Abdul Hadi Adnan.(2008). *Perkembangan Hubungan Internasional di Afrika*. Hal. 129

¹⁰ Sugeng Istanto.(2014). *Hukum Internasional* (edisi revisi). Hal:158-159

Penyebab Meningkatnya Pelanggaran HAM di Darfur.

1. Kegagalan Pasukan *African Union Mission in Sudan*

AMIS merupakan pasukan perdamaian Uni Afrika yang dibentuk pada juli 2004, yang diberi mandate untuk melakukan operasi perdamaian di wilayah konflik Darfur. Sebelum AMIS melakukan tugas Darfur Sudan, telah banyak kesepakatan ataupun perjanjian yang telah dibuat untuk menyelesaikan konflik Darfur.

Pada 31 Maret 2004, telah dilaksanakan perundingan di N'djamene, Chad yang membicarakan mengenai penyelesaian konflik Darfur. Namun pemerintah Sudan menolak untuk menghadiri perundingan tersebut.

Disetiap perundingan yang dilakukan, baik pemerintah Sudan maupun kelompok pemberontak SLM, sering kali mengajukan tuntutan berbeda tanpa adanya kesepakatan sehingga sering mengalami jalan buntu. Dalam beberapa perundingan, kelompok SLM mengajukan tuntutan agar melakukan pelucutan senjata terhadap milisi *Janjaweed* yang telah menyebabkan banyaknya korban jiwa.

Pada 8 April 2004, ditandatangani kesepakatan HCFA. Isi dari kesepakatan tersebut adalah untuk melakukan pembentukan komisi gencatan senjata. Pasca kesepakatan tersebut, maka dibentuklah *Ceasefire Commission* (CFC).

CFC menjalankan misi sebagai tim monitoring. CFC juga diberi mandate yaitu melakukan verifikasi dan implementasi perjanjian-perjanjian gencatan senjata 8 april 2004, mengatur milisi *Janjaweed*

dan kelompok pemberontak dengan tujuan untuk mengurangi resiko perang, menganalisa dan menghukum setiap pelanggaran senjata dan melakukan pengembangan hokum untuk mencegah perang.

Melihat kondisi Darfur yang tidak membaik pasca dikirimnya tim monitoring CFC, maka Uni Afrika memperluas mandate AMIS dan menambah jumlah pasukan militer untuk AMIS. AMIS mendapat tambahan pasukan sebanyak 3.320 personel yang terdiri dari pengamat militer, polisi sipil dan staff pendukung.

Untuk mencapai tujuan dari mandate yang diberikan, AMIS dituntut untuk selalu mengamati dan memeriksa situasi keamanan Darfur ketika pemulangan pengungsi, serta mengawasi gencatan senjata yang telah disepakati oleh pihak yang terlibat konflik. AMIS juga ditugaskan untuk menyelidiki dan melaporkan segala bentuk pelanggaran yang terjadi.

Meskipun AMIS memiliki mandate dan tugas yang jelas, operasi AMIS sering menemui banyak kendala yang menyebabkan masih banyak terjadi pelanggaran HAM di Darfur. Gagalnya pelucutan senjata milisi *Janjaweed* dan kelompok pemberontak adalah penyebab masih seringnya terjadi penyerangan terhadap warga sipil Darfur.

Kendala-kendala inilah yang menggambarkan kondisi dari pasukan AMIS yang tidak mampu untuk meredam konflik Darfur. Gagalnya misi AMIS karena terbatasnya mandate AMIS selama di Darfur serta AMIS belum memiliki aturan perang yang jelas. Selama

menjalankan misi di Darfur, AMIS dilarang melakukan penyerangan.

Dalam sebuah operasi militer, logistic dan pasukan merupakan hal yang sangat penting. Jumlah peralatan- peralatan pendukung militer seperti telepon satelit, kendaraan dan perlengkapan kantor yang dimiliki oleh AMIS sangatlah terbatas.

2. Kegagalan Pasukan *United Nation Mission In Sudan* (UNMIS)

Pembentukan pasukan UNMIS ini untuk membantu pasukan AMIS yang telah lebih dulu ditempatkan diwilayah konflik Darfur oleh Uni Afrika. Pasukan UNMIS terdiri dari personel militer dan polisi sipil. UNMIS memiliki masa aktif selama 6 bulan dan diberi mandate untuk memulihkan keadaan di Darfur.

Sebelum terbentuknya UNMIS, telah dibuat sebuah perjanjian yang dikenal dengan *Darfur Peace Agreement* (DPA) dengan tujuan agar Darfur kembali kondusif sehingga dapat terwujudnya perdamaian di Darfur.

Namun kelompok pemberontak SLM dan JEM menolak perjanjian tersebut, karena sesuai dengan isi perjanjian tersebut mengenai pelucutan senjata milisi *Janjaweed* oleh pemerintah Sudan tidak dilaksanakan menyebabkan konflik terus berlanjut.

Gagalnya perjanjian tersebut dilaksanakan, tidak membuat PBB dan Uni Afrika berhenti untuk mengupayakan terwujudnya perdamaian di Darfur. pada 9 Januari 2005, dibentuklah perjanjian damai yang disebut dengan *Comprehensive Peace Agreement* (CPA) antara pemerintah Sudan dengan kelompok SLM.

CPA ini berisikan tentang permasalahan politik, ekonomi, budaya dan HAM di Darfur.

Dalam menjalankan mandatnya, UNMIS juga mengemban misi kemanusiaan di Darfur. Dalam misi kemanusiaan ini, UNMIS diizinkan untuk menggunakan atau mengambil tindakan yang dianggap perlu apabila hal tersebut terjadi diwilayah penempatan pasukan UNMIS.

UNMIS tidak hanya berfokus pada misi kemanusiaan yang di emban, namun juga bertugas untuk mengawasi sert memantau pihak yang berkonflik untuk mematuhi kesepakatan gencatan senjata dan menjalankan isi perjanjian CPA.

Namun, karena tidak komitmennya milisi *Janjaweed* dan kelompok SLM dalam menjalankan kesepakatan CPA menghambat jalannya misi UNMIS di Darfur. selain itu, keterbatasan ruang gerak UNMIS yang dibatasi oleh pemerintah Sudan dan terjadinya penyerangan terhadap pasukan UNMIS menjadi penghambat dari operasi perdamaian di Darfur.

Upaya Program UNAMID Pada Konflik Darfur, Sudan

Konflik Darfur yang terus berkejolak membuat dunia internasional khususnya PBB mengirimkan pasukan penjaga perdamaian ke Darfur. Dalam menjalankan mandanya, UNAMID juga melakukan upaya- upaya program untuk perdamaian di Darfur.

Pertama, peningkatan militer. Militer sangat berperan penting dalam sebuah operasi perdamaian. Peningkatan militer

ini bertujuan agar UNAMID dapat menjalankan misinya dengan mudah. Dengan ditingkatkannya militer UNAMID, dapat membantu proses operasi kemanusiaan berlangsung.

Kedua, pelucutan senjata, demobilisasi dan reintegrasi. Tujuan dari diadakannya program ini adalah untuk memberikan kontribusi bagi keamanan dan stabilitas pasca terjadinya konflik. Upaya yang dilakukan oleh UNAMID dengan cara pelucutan senjata milisi *Janjaweed* dan kelompok SLM dapat membantu menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif kembali.

Ketiga, program Hak Asasi Manusia. UNAMID sebagai *peacekeeping operation* PBB harus mampu untuk mengatasi terjadinya pelanggaran HAM di konflik Darfur. UNAMID yang mengemban misi kemanusiaan, harus bisa melindungi warga sipil yang menjadi korban dalam konflik Darfur. Sejak tahun 2003, jumlah korban yang terluka, meninggal dan mengungsi semakin meningkat.

Keempat, Program Relawan. Program relawan ini sangat penting dalam misi UNAMID di Sudan. UNAMID yang bertugas tidak hanya untuk melindungi warga sipil tetapi juga mencakup kepada kebutuhan warga sipil. Kehadiran relawan seperti relawan kemanusiaan, yang datang untuk mengatasi masalah pangan warga sipil, peduli kesehatan serta air.

Kelima, program air. Air merupakan kebutuhan terpenting dalam kehidupan manusia, termasuk di Afrika. Selain diskriminasi dalam politik, kelangkaan air menjadi sumber konflik di Darfur. Pasca pecahnya konflik Darfur pada tahun 2003, akibat serangan yang dilakukan oleh milisi

Janjaweed di perumahan penduduk. Akibat serangan tersebut, rumah-rumah warga hancur, fasilitas umum yang juga habis dihancurkan serta sumber air yang merupakan kebutuhan terpenting di Darfur. Sehingga warga Darfur sulit untuk mendapatkan air bersih. Maka UNAMID mengupayakan program ini, agar warga Darfur tidak lagi kesulitan mendapat sumber air bersih.

Dampak Konflik Darfur

Konflik Darfur adalah konflik dengan isu pelanggaran HAM yang sangat kompleks. Bermula dari marginalisasi ekonomi, politik dan condongnya pemerintah Sudan kepada milisi *Janjaweed*. Menyebabkan munculnya kelompok-kelompok pemberontak.

Konflik Darfur memberi dampak, khususnya terhadap warga sipil, diantaranya yaitu:¹¹

1. Banyaknya warga sipil yang menjadi sasaran kekerasan sehingga terjadilah pengungsian besar-besaran untuk mencari tempat yang aman hingga ke Negara Chad.
2. Banyaknya korban berasal dari suku Afrika asli yang menderita kelaparan, kekurangan bahan pangan dan banyaknya terjangkit penyakit menular. Ini disebabkan oleh sulitnya bantuan kemanusiaan masuk kedalam wilayah konflik Darfur.
3. Hancurnya infrastruktur seperti rusaknya banyak desa, sekolah dan klinik kesehatan akibat konflik

¹¹ Elinia Reja, I Gede Pesek, I Made Budi. *Pelaksanaan Hak Asasi Manusia Dalam Konflik Bersenjata Non Internasional Di Darfur*. Hal:2

antara milisi *Janjaweed* dan kelompok pemberontak SLM.

Akibat yang ditimbulkan oleh konflik antara milisi *Janjaweed* dan kelompok pemberontak membuat UNAMID harus melakukan upaya-upaya untuk memulihkan kembali situasi di Darfur. melihat banyaknya desa- desa yang rusak, serta kurangnya air bersih dan bahan makanan, membuat banyaknya warga sipil mengalami kelaparan dan terjangkit penyakit menular.

Hambatan UNAMID Di Darfur

Pertama, kurangnya respon positif dari pihak yang terlibat konflik. Hal ini membuat UNAMID semakin sulit untuk meredakan dan menciptakan perdamaian karena masih banyaknya penyerangan yang dilakukan oleh milisi *Janjaweed* dan kelompok SLM. Ketidaksiharian pihak yang bertikai terlihat dari sikap mereka yang terus melakukan penyerangan meski telah menandatangani perjanjian yang telah dibuat. Tidak adana itikad baik dari kedua pihak untuk menyelesaikan konflik secara damai.

Kedua, kurangnya sumber daya. Meskipun UNAMID telah dibantu dengan jumlah pasukan yang banyak mencapai 97.000 personel militer, namun tidak didukung dengan perlengkapan militer dan alat yang lengkap. Kurangnya peralatan persenjataan dan alat angkut yang dimiliki UNAMID menjadi penghambat operasi perdamaian di Darfur. Sehingga UNAMID tidak mampu mengcover wilayah- wilayah konflik secara merata akibat kurangnya logistic pasukan UNAMID.

Ketiga, sulitnya pendanaan pasukan perdamaian. Keterbatasan ruang gerak

yang dialami UNAMID juga diakibatkan kurangnya pembiayaan operasi. Sehingga banyaknya pasukan perdamaian yang tidak mendapat bayaran.

Keempat, penyerangan terhadap pasukan UNAMID. UNAMID tidak luput dari serangan-serangan milisi *Janjaweed* dan kelompok SLM dan JEM. Seringkali transportasi UNAMID yang membawa perbekalan dan peralatan senjata dibajak oleh kelompok pemberontak. Seringnya jalur-jalur masuknya logistic bagi pasukan perdamaian ditutup oleh kelompok-kelompok pemberontak, semakin menghambat terwujudnya perdamaian di Darfur.

III. Kesimpulan

Ketidakhampuan pemerintah Sudan dalam menyelesaikan konflik Darfur serta kurangnya dukungan terhadap operasi perdamaian yang dilakukan PBB di Darfur membuat proses perdamaian sulit untuk diwujudkan. Kurangnya sumber dana dalam pelaksanaan operasi perdamaian juga menjadi penghambat jalannya suatu operasi perdamaian.

Resolusi-resolusi yang dikeluarkan oleh DK PBB untuk penyelesaian konflik Darfur yang bertujuan agar pihak yang bertikai antara milisi *Janjaweed* dan kelompok pemberontak SLM, JEM dapat mencapai kesepakatan damai sehingga konflik dapat di akhiri.

Tidak hanya resolusi DK PBB, perjanjian damai dan gencatan senjata pun telah dilaksanakan, namun perjanjian tersebut tidak benar-benar dilaksanakan oleh pihak yang bertikai. Hingga dikirimnya pasukan perdamaian ke

wilayah konflik untuk mengawasi kesepakatan yang telah dibuat.

Sejak dikirimnya pasukan UNAMID di Darfur tahun 2007, UNAMID telah melakukan melaksanakan mandatnya serta upaya- upaya program untuk mencapai perdamaian di Darfur.

Meskipun upaya- upaya tersebut telah dilaksanakan untuk tercapainya perdamaian di Darfur, namun UNAMID belum mampu untuk mengatasi terjadi penyerangan dari milisi *Janjaweed* dan kelompok SLM.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnan, Abdul Hadi.(2008). *Perkembangan Hubungan Internasional di Afrika*. PT. Angkasa. Bandung
- Boer Mauna, 2011, *Hukum Internasional Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Cetakan 4, PT. Alumni, Bandung.
- Rizky Octa Putri Charin dan M. Saeri. 2016. *Kepentingan Iran Melakukan Intervensi terhadap Konflik Internal Yaman*. Pekanbaru.
- Istanto, Sugeng.(2014). *Hukum Internasional* (Edisi Revisi). Yogyakarta; Cahaya Atma Pustaka
- Sambi, Petrus Krisologus Jullio. 2016. *Peranan UNAMID Dalam Mengatasi Konflik Bersenjata Antara Kelompok Pemberontak Di Darfur Dengan Pemerintah Sudan*. Universitas Atma Jaya.
- United Nation Security Council. Resolution 1769 (2007)
- United Nation Security Council. Report of the Secretary-General on the African Union-United Nations Hybrid Operation in Darfur. 2014
- Peran Uni Afrika Dalam Resolusi Konflik Darfur 2003-2007.
<http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24220/1/ihsan.pdf>
- Peacekeeping Operation.
<http://lontar.ui.ac.id/file?file=digital/132923-T%2027784-Peacekeeping%20operation-Analisis.pdf>
- Peran UNAMID Dalam Menyelesaikan Konflik Darfur
<http://thesis.umy.ac.id/datapublik/t22355.pdf>
- <http://www.ec.europa.eu.echo/darfurfinal.pdf>
- Korban Tewas Konflik Darfur.
<http://www.dw.com/id/korban-tewas-konflik-darfur-bisa-mencapai-300000-orang/a-3287551> (diakses 23 April 2017)
- <http://www.un.org/zh/focus/southern Sudan/pdf/dpa.pdf> (Di akses pada 29 April 2017)